



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EDI RIANTO
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 216235

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.976.460.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m²/120 m² di KAB / KOTA KEBUMEN, WARISAN Rp. 768.960.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 151 m²/36 m² di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 347.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m²/36 m² di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 108.000.000
4. Tanah Seluas 1680 m² di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 172.500.000
5. Tanah Seluas 700 m² di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
6. Tanah Seluas 472 m² di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 335.000.000
7. Tanah Seluas 1467 m² di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **250.500.000**

1. MOTOR, YAMAHA VEGA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000



3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000

4. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
215.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 237.255.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 435.445.469

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.899.660.469

III. HUTANG Rp. 160.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.739.660.469

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.